

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI, PENGAWASAN INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PANGKEP

Marni^{*1}, Rustam DM², Abdul Khalik³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}marnimadjid75@gmail.com, ²rustandm66@gmail.co.id, ³Khalik@stienobel-indonesia.ac.id

ABSTRAK

Laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, maka laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas, beberapa determinan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain :penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Kabupaten Pangkep merupakan bagian dari Negara Indonesia yang mempunyai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 40, salah satunya adalah Dinas Ketenagakerjaan yang juga diharapkan menyusun laporan keuangan yang berkualitas setiap tahunnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan Software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep; 2) penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep dan 3) penerapan variabel sistem informasi keuangan berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.

Kata kunci : Sistem Informasi Keuangan, Pengawasan Internal, Komitmen Organisasi, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

Local government financial reports are very important to be used as a basis for making economic, social, and political decisions, so the financial statements presented must be of quality, several determinants that affect the quality of financial reports include: application of financial information systems, internal control and organizational commitment to report quality. finance. Pangkep Regency is part of the State of Indonesia which has 40 Regional Work Units (SKPD), one of which is the Manpower Office which is also expected to compile quality financial reports every year. The approach used in this study is a quantitative method using multiple linear regression data analysis with SPSS software. The results of the study show that: 1) The application of financial information systems, internal control and organizational commitment partially affect the quality of financial reports at the Pangkep District Manpower Office; 2) the application of financial information systems, internal control and organizational commitment have a simultaneous effect on the quality of financial reports at the Pangkep Regency Manpower Office and 3) the application of financial information system variables has a dominant influence on the quality of financial reports at the Pangkep Regency Manpower Office.

Keywords : *Financial Information System, Internal Control, Organizational Commitment, Quality of Financial Reports*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang informasi hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai entitas

pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan daerah. Tuntutan terhadap sektor publik, mewajibkan lembaga-lembaga publik khususnya pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud apabila LKPD telah memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Fenomena perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini adalah tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2014). Oleh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan akuntabilitas tersebut di atas.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Fahmi (2017:4) “kualitas laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan.” Prinsip penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan suatu keharusan yang harus diterapkan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Kabupaten Pangkep merupakan bagian dari Negara Indonesia yang mempunyai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 40, salah satunya adalah Dinas Ketenagakerjaan yang juga diharapkan menyusun laporan keuangan yang berkualitas setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkep sejak tahun anggaran 2012 hingga tahun 2019 memperoleh penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini WTP ini tentunya didukung oleh berbagai hal diantaranya adalah penerapan sistem informasi keuangan.

Penyusunan laporan keuangan diperlukan sistem akuntansi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep dalam penerapan sistem informasi keuangan disajikan dalam bentuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sistem ini bertujuan untuk membantu pencatatan transaksi secara benar dan tepat waktu. Adapun kendala-kendala yang masih sering dalam penggunaan terjadi seperti keterlambatan dalam proses pembuatan dan penyampaian laporan keuangan. Hal ini dipengaruhi oleh karena sistem aplikasi yang belum sempurna dan jaringan yang kurang stabil. Menurut Jogiyanto (2014:36) “Sistem

Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.”

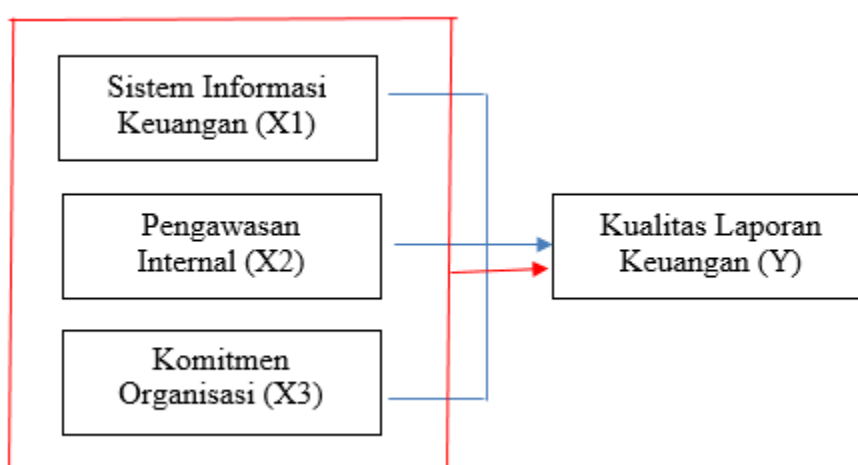
Selain penerapan sistem informasi keuangan, salah satu faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Djalil, 2014). Tahap pengawasan, seharusnya merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal di Kabupaten Pangkep dilakukan oleh pihak Inspektorat dimana salah satu tugasnya adalah memastikan kesesuaian antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya di lapangan termasuk dengan penggunaan anggaran di Dinas Ketenagakerjaan, pihak Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep setiap tahun berjalan. Dalam pengawasan internal ini pihak Inspektorat akan memberikan laporan terkait temuan-temuan, beberapa temuan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan kebanyakan temuan administrasi misalnya tidak lengkapnya dokumen kontrak, ataupun masih adanya dokumen yang belum ditandatangani oleh pihak penerima barang hibah berupa bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan. Walaupun temuan ini sifatnya administratif tetapi tetap harus ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan. Dengan demikian melalui pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya yang ada di Dinas Ketenagakerjaan sehingga berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memberikan keyakinan keandalan.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Menurut Gibson, et.al (2012) lebih rinci mengatakan bahwa komitmen organisasional berkaitan dengan tiga sikap: “*Commitment to organization to an organization involves three attitudes: (1) a sense of identification with the organization’s goals; (2) a feeling of involvement in organizational duties; and (3) a feeling of loyalty for the organization*”. Luthans (dalam Mubyl & Dwinanda, 2019) menyebutkan komitmen organisasional paling sering didefinisikan sebagai 1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, 2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, 3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan keinginan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Komitmen organisasi dari para pegawai di Dinas Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan karena melalui komitmen yang tinggi maka akan menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya komitmen organisasi dari para pegawai di Dinas Ketenagakerjaan untuk mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut akan berdampak pada semakin baiknya kualitas dari informasi laporan keuangan. Pernyataan ini mendukung hasil penelitian Suwanda (2015), yaitu komitmen organisasi secara signifikan

mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Fenomena buruknya kualitas informasi laporan keuangan daerah memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan. Administrasi keuangan yang buruk tersebut berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya. Tata Kelola keuangan yang buruk menyebabkan ekonomi biaya tinggi: pelayanan kepada publik yang buruk, tingkat kerusakan fasilitas publik yang lebih cepat dan biaya transaksi yang tinggi. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan, dengan melalui perbaikan sistem di bidang manajemen keuangan daerah, menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan ▼ = Secara Parsial
 ▼ = Secara Simultan

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.
2. Diduga penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.
3. Diduga penerapan variabel sistem informasi keuangan berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang terdiri dari: data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari responden, melalui kuesioner yang disebar dan data sekunder yaitu berupa literatur-literatur kepustakaan yang digunakan sebagai dasar teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Di Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep yang jumlahnya sebanyak 41 Orang.

Penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sampel total (*total sampling*) atau sensus. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep. Kuesioner yang diberikan kepada responden merupakan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan sehingga responden hanya tinggal mengisi jawaban dengan memberi tanda *check list* pada kolom jawaban yang tersedia dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian yang bersumber dari berbagai dokumen baik berupa laporan penelitian, jurnal, buku-buku ataupun dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Pernyataan	r Tabel	r Hitung	Ket	Standar Alpha	Alfa Cronbach	Ket
1	Penerapan Sistem Informasi Keuangan (X1)	X1.1	0,3081	0,732	Valid	0,60	0,883	Reliabel
		X1.2		0,570				
		X1.3		0,834				
		X1.4		0,656				
		X1.5		0,761				
		X1.6		0,630				
2	Pengawasan Internal (X2)	X2.1	0,381	0,529	Valid	0,60	0,886	Reliabel
		X2.2		0,553				
		X2.3		0,488				
		X2.4		0,748				
		X2.5		0,553				
		X2.6		0,764				
		X2.7		0,730				
		X2.8		0,666				
		X2.9		0,510				
		X2.10		0,649				
3	Komitmen Organisasi (X3)	X3.1	0,381	0,581	Valid	0,60	0,842	Reliabel
		X3.2		0,683				
		X3.3		0,700				
		X3.4		0,707				
		X3.5		0,832				
		X3.6		0,374				
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0,381	0,695	Valid	0,60	0,902	Reliabel
		Y2		0,770				
		Y3		0,808				
		Y4		0,671				
		Y5		0,713				
		Y6		0,467				
		Y7		0,814				
		Y8		0,598				

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal, komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan memiliki nilai r hitung lebih besar dibanding r tabel maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid serta masing-masing variabel yaitu penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal, komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan memiliki *cronbach's alpha* $> 0,60$. Dengan demikian, hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel. Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik terdiri dari:

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien Regresi	Standar Error	Koef. Beta	t hit	Sig.
Constanta	0,255	0,352		0,724	0,474
Sistem Informasi Keuangan (X1)	0,326	0,139	0,354	2,340	0,025
Pengawasan Internal (X2)	0,396	0,189	0,348	2,097	0,043
Komitmen Organisasi (X3)	0,212	0,096	0,259	2,215	0,033

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa persamaan rumus regresi linier berganda dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 0,255 + 0,326 X1 + 0,396 X2 + 0,212 X3$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa:

- Nilai konstanta 0,255 mempunyai arti bahwa apabila variabel-variabel bebas yaitu penerapan sistem informasi keuangan (X1), pengawasan internal (X2) dan komitmen organisasi (X3), itu konstan atau tidak berubah maka variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan (Y) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep bernilai positif yaitu sebesar 0,255.
- β_1 (nilai koefisien regresi X1) 0,326 mempunyai arti bahwa jika penerapan sistem informasi keuangan (X1) meningkat sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka kualitas laporan keuangan (Y) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep juga akan meningkat sebesar 0,326.
- β_2 (nilai koefisien regresi X2) 0,396 mempunyai arti bahwa jika pengawasan internal (X2) meningkat sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka kualitas laporan keuangan (Y) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep juga akan meningkat sebesar 0,396.
- β_3 (nilai koefisien regresi X3) 0,212 mempunyai arti bahwa jika komitmen organisasi (X3) meningkat sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka kualitas laporan keuangan (Y) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep juga akan meningkat sebesar 0,212.

Uji t (Secara Simultan)**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji-t)**

No	Variabel	Nilai t_{hitung}	Sig	Kesimpulan
1	Penerapan Sistem Informasi Keuangan (X1)	2,340	0,025	Signifikan
2	Pengawasan Internal (X2)	2,097	0,043	Signifikan
3	Komitmen Organisasi (X3)	2,215	0,033	Signifikan

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian pengaruh variabel penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep secara parsial memiliki nilai t hitung berturut-turut sebesar 2,340, 2,097 dan 2,215 dengan nilai signifikan t berturut-turut sebesar 0,025, 0,043 dan 0,033. Berdasarkan nilai signifikan t tersebut, menunjukkan bahwa lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.

Uji F (Secara Simultan)**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji-F)**

Model	Jumlah Kuadrat	DF	Rata-Rata Kuadrat	F hit	Sig.
Regresi	8,771	3	2,294	47,29	0,00
Sisa	2,287			5	0
Total	11,059				

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil pengujian pengaruh variabel hasil pengujian pengaruh variabel penerapan sistem informasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep secara simultan memiliki nilai F hitung sebesar 47,295 dengan nilai signifikan F sebesar 0,000. Berdasarkan nilai signifikan F tersebut, menunjukkan bahwa lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.

Uji Beta (Dominan)**Tabel 5. Standardized Koefisien Regresi**

Peringkat	Variabel	Standardized Coefficient Beta
I	Penerapan sistem informasi keuangan (X1)	0,354

Peringkat	Variabel	Standardized Coefficient Beta
II	Pengawasan Internal (X2)	0,348
III	Komitmen Organisasi (X3)	0,259

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem informasi keuangan (X1) memiliki nilai koefisien regresi yang paling tinggi yaitu 0,354 dibandingkan dengan variabel pengawasan internal (X2) yaitu sebesar 0,348 dan variabel komitmen organisasi (X3) sebesar 0,259. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi keuangan berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,891	0,793	0,776

Sumber : Data Diolah, 2021

Nilai koefisien determinasi *adjusted R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,776. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas yaitu penerapan sistem informasi keuangan (X1), pengawasan internal (X2) dan komitmen organisasi (X3) memberikan kontribusi terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan (Y) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep sebesar 77,6% sedangkan sisanya sebesar 22,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dimana diperoleh nilai koefisien sebesar 32,6% yang berarti bahwa setiap kenaikan variabel penerapan sistem informasi keuangan sebesar 1 akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 32,6%. Demikian pula nilai t hitung variabel penerapan sistem informasi keuangan dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari α yang dipersyaratkan ($0,025 < 0,05$). Hasil ini membuktikan bahwa variabel penerapan sistem informasi keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sistem informasi keuangan yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imelda Latjandu, dkk (2016) dan Sintike Mentari Modo, dkk (2018) yang mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Azhar Susanto (2013) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, berguna dan dapat dipercaya. Jadi pada dasarnya sistem informasi

keuangan merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memudahkan suatu organisasi dalam memproses data dan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam pengambilan keputusan, dimana sistem informasi keuangan adalah sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan.

Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dimana diperoleh nilai koefisien sebesar 39,6% yang berarti bahwa setiap kenaikan variabel pengawasan internal sebesar 1 akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 39,6%. Demikian pula nilai t hitung variabel pengawasan internal dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari α yang dipersyaratkan ($0,043 < 0,05$). Hasil ini membuktikan bahwa variabel pengawasan internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep sehingga dapat dikatakan bahwa melalui pengawasan internal yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sintike Mentari Modo, dkk (2018) dan Yoki Dodopo, dkk (2018) yang mengemukakan bahwa pemantauan internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan keuangan daerah ialah 1) pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; 2) pertanggungjawaban keuangan daerah serta 3) pendapatan dan belanja daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dimana diperoleh nilai koefisien sebesar 21,2% yang berarti bahwa setiap kenaikan variabel komitmen organisasi sebesar 1 akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 21,2%. Demikian pula nilai t hitung variabel komitmen organisasi dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari α yang dipersyaratkan ($0,033 < 0,05$). Hasil ini membuktikan bahwa variabel komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep sehingga dapat dikatakan bahwa melalui komitmen organisasi yang baik dari para pegawai maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imelda Latjandu, dkk (2016) dan Rahman (2017) yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh Allen (2013) bahwa komitmen merupakan suatu sikap seseorang yang mempengaruhi tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kontribusi demi tercapainya tujuan organisasi dengan tetap

berpartisipasi aktif dalam sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya dinyatakan oleh Rahman (2017) bahwa komitmen organisasi merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi. Terkait dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit satuan kerja perangkat daerah, dengan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, semakin tinggi komitmen organisasi dari semua elemen mengoperasikan fungsi-fungsinya, maka semakin berkualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan suatu organisasi.

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Pengawasan Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan ($0,000 < 0,05$) ini berarti bahwa penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep. Hal ini menjelaskan bahwa jika kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi artinya jika penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi diterapkan dengan baik maka kualitas laporan keuangan akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imelda Latjandu, dkk (2016), Sintike Mentari Modo, dkk (2018) dan Yoki Dodopo, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pemantauan internal dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil koefisien determinasi yang ditunjukkan melalui nilai Adjusted R Square sebesar 0,776. Hal ini berarti bahwa penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi secara bersama-sama berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep sebesar 77,6% sedangkan sisanya sebesar 32,4% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti seperti kompetensi sumber daya manusia, kejelasan tujuan laporan keuangan, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, serta faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berpengaruh Dominan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji pengaruh variabel bebas yang dominan yang ditunjukkan melalui nilai Standardized Koefisien Beta yang paling tinggi yaitu variabel penerapan sistem informasi keuangan sebesar 0,354 sehingga dinyatakan bahwa variabel penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep. Dengan demikian penerapan sistem informasi keuangan harus mendapatkan perhatian yang tinggi dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan sistem informasi keuangan mempunyai kedudukan yang penting dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena melalui penerapan sistem informasi keuangan yang baik maka dapat dicapai keunggulan melalui kecepatan, fleksibilitas, integrasi, dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Sistem informasi keuangan mampu memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini telah diterapkan di Kabupaten Pangkep melalui software Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sistem ini bertujuan untuk membantu pencatatan transaksi secara benar dan tepat waktu.

KESIMPULAN

1. Penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.
2. Penerapan sistem informasi keuangan, pengawasan internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.
3. Variabel penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep.

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, Rizal. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca. Reformasi. Jakarta. PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Allen., and Meyer. (2013). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to Organization. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Fahmi, Irham. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Bandung. Alfabeta.
- Firman, A., & Said, S. (2016). Linking organizational strategy to information technology strategy and value creation: impact on organizational performance. *Journal of Business and Management Sciences*, 4(3), 60-67.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, et.al., James. (2012). Organization:Behaviour, Structure, Processes. 14th Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Imelda, Latjandu., Lintje, Kalangi., Jantje, J. Tinangon. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud, *Journal Accountability*, 5(2):98-109.
- Jogiyanto. (2014). Analisis dan Desain Sistem Informasi, Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2014). Akuntansi Sektor Publik.. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta. CV.Andi Offset.
- Mubyl, M., & Dwinanda, G. (2019). Peran Subjective well-Being, kepemimpinan Transformasional dan komitmen organisasional dalam memprediksi kinerja karyawan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Rahman, Pura. (2013). Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Sahadu, N. M., Razak, M., & Firman, A. (2021). PENGARUH PENERAPAN TRANSAKSI NON-TUNAI, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 2(2), 252-266.

Sintike, Mentari, Modo., David, Paul, Elia, Saerang., Agus, Tony, Poputra. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud), *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 7(2):14-30.

Suwanda, Dadang. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6 (4):139-157.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Yoki, Dodopo., Jullie, J. Sondakh., dan Jantje, J. Tinangon. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, Dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1):22-31.